

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya..* Jakarta: Kencana. Edisi 2, Cetakan Ke 5.
- Braun, Virginia dan Clarke, Victoria. 2006. *Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology*, 3 (2). pp. 77-101.
- Dhani, Rachmat. (2012). *Evaluasi Sistem Realisasi Belanja dan Sistem Pemeriksaan Keuangan*. Tesis. Tidak Dipublikasikan, Program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- DJPK.. (2013). *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- DJPK (a). (2013). *Evaluasi Belanja Modal Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Iqbal. (2012). *Seri Bunga Rampai : Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ilie, George and Ciocoiu C.N. (2010). *Application of Fishbone Diagram To Determine The Risk Of An Eventh With Multiple Causes*. Management Research and Practice Vol 2 Issue 1 p:1-20.
- LHP BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011.
- LHP BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012.
- LHP BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
- <http://www.asq.org/learn-about-quality/cause-analysis-tools/overview/fishbone.html>. American Society for Quality, Fishbone diagram.diunduh pada tanggal 11 Maret 2015.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi I. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meireni, Angela Heyfe, Silfrid S Pangemanan dan Dhullo Affandi. (2014). *Perlakuan Akuntansi Belanja Modal pada DPPKAD Kabupaten Palu*. Jurnal EMBA. Vol 2 No. 3 September 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri No 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri No 13. Tahun 2006.

Ritonga, Irwan Taufiq dan Ehrman Suhartono. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah (Sesuai PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)*. Edisi 1: Juli 2012. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesepuluh. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yin, Robert K. (2014). *Studi Kasus: Desain dan Metode*/Robert K. Yin, Penerjemah: M. Djauzi Mudzakir- Ed.1-13. Jakarta: Rajawali Pers.